

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026



RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Perangkat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sekarang ini dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Telah disusun dan diterbitkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 guna pengelolaan kegiatan perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar karena seperti yang diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam mencapai tujuannya.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta usaha untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efisien dan efektif maka diperlukan adanya Penyusunan atas Renja Tahun 2026 ini.

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam penyusunan Perencanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel.

Karanganyar, September 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR



BAKDO HARSONO, S.STP., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780403 199703 1 003

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026 Serta Capaian Renstra Tahun 2025-2029.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP	II-18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran	III-3
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-5
3.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	III-6
3.5. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD.....	III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
4.1. Program dan Kegiatan	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	V-1
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3. Rencana Tindak Lanjut	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025 TW II	II-1
Tabel 2.2.	Realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2024 dan Tahun 2025 TW II	II-3
Tabel 2.3.	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II-5
Tabel 2.4.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)	II-6
Tabel 2.5.	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 pada Renstra 2024-2026	II-14
Tabel 2.6.	Capaian Indikator Program PD Tahun 2024 dan 2025 TW II	II-15
Tabel 2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar	II-16
Tabel 2.8.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar ..	II-20
Tabel 2.9.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar	II-31
Tabel 3.1.	Tujuan-Sasaran-Indikator dan Target Tahun 2026	III-6
Tabel 3.2.	Keselarasasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD	III-8
Tabel 3.3.	Keselarasasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	III-8
Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027	IV-3
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar	IV-28
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar	IV-28
Tabel 4.4.	Program/ Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026...	IV-28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) Tahun. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta ditambah lagi dengan sub urusan pemadam kebakaran, perencanaan strategis kinerja

merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Nomor 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bidang Urusan Trantibum Linmas yang memuat program dan kegiatan Pembangunan daerah untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan Pembangunan daerah bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026. Renja Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya ketentuan peraturan tentang perencanaan;
2. Tersedianya dokumen acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya, dengan pembiayaan yang bersumber baik dari APBD Kabupaten Karanganyar;
3. Terjabarnya gambaran umum, program-program dan kegiatan-kegiatan SATPOL PP dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Terlaksananya seluruh jajaran aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan;

5. Tersedianya alat pengukuran kinerja aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan program dan kegiatan;
6. Tersedianya masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Daerah dan kebijakan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Terciptanya sinergi program-program dan kegiatan-kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan program-program dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya Pemerintah Daerah mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, baik antar OPD, Instansi/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat;
8. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran dalam rangka program penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026 Serta Capaian Renstra Tahun 2025-2029
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026 Serta Capaian Renstra Tahun 2025-2029

Evaluasi bertujuan untuk membuat perbaikan agar kegiatan yang terselenggara sesuai dengan rencana yang dirancang. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perencanaan lanjutan guna memperbaiki kekurangan dan kendala baik dalam proses administrasi maupun manajemen.

Demikian juga rencana kerja perangkat Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar perlu dievaluasi agar perencanaan di tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang lalu dan berkesinambungan. Pada evaluasi RKPD Tahun 2025 ini memuat kajian terhadap hasil pelaksanaan sesuai hasil evaluasi Program kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025 dan perkiraan pencapaian tahun 2026.

2.1.1 Evaluasi Anggaran Perangkat Daerah

a. Perbandingan usulan Rencana Kerja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Berikut ini akan disajikan persandingan antara anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada Rencana Kerja dan APBD Penetapan dan Perubahan untuk tahun 2024 dan 2025, sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 13.331.262.909,00** yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai		Rp.	6.723.129.709,00
b. Belanja Barang dan Jasa		Rp.	6.315.136.650,00
c. Belanja Modal :			
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp.	292.996.550,00
TOTAL		Rp.	13.331.262.909,00

Tabel 2.1.
 Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
 Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.479.724.90 7	6.479.724.90 7	100	6.255.367.80 9	7.322.417.80 9	117,58
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.124.300	13.124.300	100	5.212.000	5.212.000	100
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.067.200	5.067.200	100	2.606.000	2.606.000	100
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.057.100	8.057.100	100	2.606.000	2.606.000	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.217.697.20 7	5.217.697.20 7	100	5.730.329.70 9	6.723.129.70 9	117,32
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.217.697.20 7	5.217.697.20 7	100	5.730.329.70 9	6.723.129.70 9	117,32
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.931.922	205.931.922	100	95.123.800	116.606.100	122,58
4)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.308.400	6.308.400	100		1.028.100	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.825.000	32.825.000	100			
6)	Penyediaan bahan logistik kantor	47.744.422	47.744.422	100	32.623.800	32.623.800	100
7)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.612.500	13.612.500	100	12.500.000	12.500.000	100
8)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.865.000	5.865.000	100			
9)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99.576.600	99.576.600	100	50.000.000	70.454.200	140,90
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000	400.000.000	100			
10)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	400.000.000	0			
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.043.478	247.043.478	100	200.400.000	201.000.000	100,29
11)	Penyediaan jasa surat menyurat	17.763.578	17.763.578	100			
12)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	167.400.000	167.400.000	100	150.000.000	150.000.000	100
13)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	61.879.900	61.879.900	100	50.400.000	51.000.000	101,19
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	395.928.000	395.928.000	100	224.302.300	276.470.000	123,25
14)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.864.000	360.864.000	100	224.302.300	276.470.000	123,25
15)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.444.000	14.444.000	100			
16)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.620.000	20.620.000	100			
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.758.172.48 ₂	7.521.673.64 ₈	100	4.145.440.00 ₀	5.075.695.10 ₀	122,44
7.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6.678.000.80 ₀	6.496.911.44 ₈	100	3.535.040.00 ₀	3.540.040.00 ₀	100,14
17)	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Patroli	5.676.804.50 ₀	5.676.804.50 ₀	100	3.390.040.00 ₀	3.390.040.00 ₀	100
18)	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	30.000.000	30.000.000	100			
19)	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	194.473.000	194.473.000	100	145.000.000	100.000.000	68,96
20)	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	354.511.300	354.511.300	100			
21)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	422.212.000	422.212.000	100		50.000.000	0
8.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	1.075.171.68 ₂	1.075.171.68 ₂	100	610.400.000	1.535.655.10 ₀	251,58
22)	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	330.500.000	330.500.000	100			
23)	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	744.671.682	744.671.682	100	610.400.000	1.535.655.10 ₀	251,58
9.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	5.000.000	5.000.000	100			
24)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5.000.000	5.000.000	100			
III.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.129.898.20 ₀	1.129.898.20 ₀	100	832.400.000	933.150.000	112,10
10.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.093.065.20 ₀	1.093.065.20 ₀	100	832.400.000	933.150.000	112,10
25)	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.031.247.00 ₀	1.031.247.00 ₀	100	832.400.000	933.150.000	112,10
26)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	45.073.200	45.073.200	100			

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
27)	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	16.745.000	16.745.000	100			
11.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	10.000.000	10.000.000	100			
28)	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	10.000.000	10.000.000	100			
12.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	26.833.000	26.833.000	100			
29)	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	26.833.000	26.833.000	100			

Sumber : Satpol PP, 2025 diolah

Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 118,67%.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja yang semula terpenuhi sejumlah Rp. 13.331.262.909,00 atau 118,67% harus berkurang sebesar Rp. 231.290.000,00 sehingga pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah Rp. 13.099.972.909,00 atau 116,61% dari rencana kerja tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, akan disajikan dalam tabel 2.2, berikut ini.

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP
Tahun 2024 dan Tahun 2025 TW II

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD (EFISIENSI)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.479.724.907	6.218.976.308	95,97	7.294.153.009	2.643.330.704	36,23
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.124.300	12.928.300	98,5	3.936.000	1.750.000	44,46
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.067.200	4.881.200	96,33	2.606.000	1.330.000	51,04
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.057.100	8.047.100	99,88	1.330.000	420.000	31,58
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.217.697.207	5.016.970.010	96,15	6.723.129.709	2.402.136.432	35,73
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.217.697.207	5.016.970.010	96,15	6.723.129.709	2.402.136.432	35,73
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.931.922	196.281.565	95,31	89.617.300	40.575.840	45,27
4)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.308.400	6.243.400	98,97	1.028.100	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD (EFISIENSI)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.825.000	32.400.000	98,71	-	-	-
6)	Penyediaan bahan logistik kantor	47.744.422	47.744.422	100	30.054.000	17.223.110	57,31
7)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.612.500	13.612.500	100	11.550.000	4.960.000	42,94
8)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.865.000	5.055.000	86,19	-	-	-
9)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99.576.600	91.226.243	91,61	46.985.200	18.392.730	39,15
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000	397.590.500	99,40	-	-	-
10)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	397.590.500	99,40	-	-	-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.043.478	231.453.213	93,68	201.000.000	85.501.382	42,53
11)	Penyediaan jasa surat menyurat	17.763.578	17.763.578	100	-	-	-
12)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	167.400.000	151.809.735	90,69	150.000.000	60.301.382	40,20
13)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	61.879.900	61.879.900	100	51.000.000	25.200.000	49,41
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	395.928.000	363.752.720	91,87	276.470.000	113.367.050	41,01
14)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.864.000	329.382.720	91,28	276.470.000	113.367.050	41,01
15)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.444.000	14.065.000	97,38	-	-	-
16)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.620.000	20.305.000	98,47	-	-	-
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.758.172.48 ₂	7.521.673.64 ₈	96,95	4.906.083.35 ₀	2.218.569.35 ₀	45,22
7.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6.678.000.80 ₀	6.496.911.44 ₈	97,28	3.409.025.00 ₀	1.650.704.00 ₀	48,42
17)	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	194.473.000	173.950.000	89,45	36.665.000	-	-
18)	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	354.511.300	337.170.148	95,11	-	-	-
19)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	422.212.000	417.407.600	98,86	50.000.000	26.400.000	52,80
20)	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Patroli	5.676.804.50 ₀	5.538.476.50 ₀	97,56	3.322.360.00 ₀	1.624.304.00 ₀	48,89
21)	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	30.000.000	29.907.200	99,69	-	-	-
8.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	1.075.171.68 ₂	1.024.762.20 ₀	95,31	1.497.058.35 ₀	567.865.350	37,93
22)	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	330.500.000	320.563.200	96,99	-	-	-
23)	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	744.671.682	704.199.000	94,57	1.497.058.35 ₀	567.865.350	37,93
9.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	5.000.000	-	0	-	-	-
24)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5.000.000	-	0	-	-	-
III.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.129.898.20 ₀	1.114.533.50 ₀	98,64	899.736.550	417.090.800	46,36
10.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.093.065.20 ₀	1.077.830.50 ₀	98,6	899.736.550	417.090.800	46,36
25)	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.031.247.00 ₀	1.017.141.50 ₀	98,63	899.736.550	417.090.800	46,36

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD (EFISIENSI)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
26)	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	16.745.000	16.745.000	100	-	-	-
27)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	45.073.200	43.944.000	97,49	-	-	-
11.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	10.000.000	9.870.000	98,70	-	-	-
28)	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	10.000.000	9.870.000	98,70	-	-	-
12.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	26.833.000	26.833.000	100	-	-	-
29)	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	26.833.000	26.833.000	100	-	-	-
	1 Urusan, 3 Program, 12 Kegiatan, 29 Subkegiatan	15.367.795.589	14.855.183.456	96,66	13.099.972.909	5.278.990.854	40,29

Sumber : SATPOL PP, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 15.367.795.589,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 14.855.183.456,00 atau **96,66 %**, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 93,74%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 5.278.990.854,00 atau 40,29% dari pagu anggaran Rp. 13.099.972.909,00 setelah adanya efisiensi.

Tabel.2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.149.282.544	5.801.183.393	94,33	6.479.724.907	6.218.976.308	95,97
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.794.988.200	5.329.537.900	91,96	7.758.172.482	7.521.673.648	96,95
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.088.914.000	1.087.482.300	99,86	1.129.898.200	1.114.533.500	98,64
	Persentase realisasi	13.033.184.744	12.218.203.593	93,74	15.367.795.589	14.855.183.456	96,66
	Rata-rata realisasi 3 program			95,38			97,18

Sumber : SATPOL PP, 2025 diolah

Serapan anggaran selama 2 tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut SATPOL PP perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

1	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW III	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW III (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran								
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD		99,06%						
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Satpol PP		98,12%	2 Dokumen	2 Dokumen	96,33%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Bulan Tersedianya Laporan Keuangan		100%	2 Dokumen	2 Dokumen	99,88%	2 Dokumen	1 Dokumen	31,58%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah		94,44%	100%					
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	94,44%	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	96,15%	52 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	51,07%

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah tersedia	-	87,99%	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	-	87,99%	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor		90,57%	100%	100%				
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bnagunan Kantor yang Disediakan		71,43%	1 Paket	1 Paket	98,97%	1 Paket	1 Paket	100%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		99,47%	1 Paket	1 Paket	98,71%	-	-	-
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		100%	38 Item	38 Item	100%	1 Paket	1 Paket	79,91%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang disediakan		99,95%	9 Item	8 Item	100%	1 Paket	1 Paket	73,12%
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		73,66%	3 Item	3 Item	86,19%	-	-	-
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		98,93%	12 Bulan	12 Bulan	91,61%	12 Laporan	9 Laporan	65,93%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	100%	100%	99,40%	-	-	-
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	2 Unit	2 Unit	99,40%	-	-	-
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		94,87%	100%					
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		97,43%	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		87,26%	12 Bulan	12 Bulan	90,69%	12 Bulan	9 Bulan	59,34%

1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		99,94%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	68,63%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		94,18%	100%					
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak&Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	95,25%	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	-	30 Unit	30 Unit	91,28%	30 Unit	30 Unit	75,21%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		95,51%	10 Unit	10 Unit	97,38%	10 Unit	-	-
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	88,78%	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		97,20%	10 Unit	10 Unit	98,47%	1 Unit	-	-
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			100%		-	-	-	-
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase tertanganinya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum		94,32%	100%		100%	-	-	-
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota		86,06%	2 Dokumen	2 Dokumen	89,45%	1 Dokumen	-	-
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		92,96%	6 Dokumen	2 Dokumen	95,11%	1 Dokumen	-	-

1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		96,44%	180 Orang	180 Orang	98,86%	-	-	-
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		96,14%	4 Laporan	12 Laporan	97,56%	12 Laporan	-	-
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		100%	120 Laporan	1 Laporan	99,69%	1 Laporan	-	-
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-	-	-	-	-	5 Unit		
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-	-	-	-	-	200 Orang	-	-
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Meningkatnya Penegakan Perda		78,46%	100%					
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		77,19%	12 Laporan	12 Laporan	96,99%	-	-	-
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP		79,74%	12 Laporan	12 Laporan	94,57%	-	-	-
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas anggota PPNS		31,18%	100%					

1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS		31,18%	12 Laporan	-	-	-	-	-
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATA NON KEBAKARAN	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100%					
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase tertanganinya kasus pemadaman kebakaran		99,29%	100%					
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya		99,98%	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		-	6 Laporan	12 Laporan	98,63%	12 Bulan	3 Bulan	23,95 %
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		-	60 Orang	60 Orang	100%	-	-	-
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		98,60%	25 Unit	-	97,49%	1 Unit	4 Unit	97,49 %
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase dilakukan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		97,90%	100%					
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang		97,90%	4 Dokumen	1 Dokumen	98,70%	3 Dokumen	1 Dokumen	98,70%

		Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran								
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya		-	5 Kecamatan					
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/ Kelurahan	-	5 Desa/ Kelurahan	5 Desa/ Kelurahan	100%	3 Desa/ Kelurahan	Na	Na

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 pada Renstra
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 TW I
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat birokrasi	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	88	70,75*	80,39		
	Meningkatkan kondusifitas wilayah	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan	%	37,5	38	101,3		
		Responstime Penanganan Kebakaran	%	48,8	69,4	142,2		
Terwujudnya penegakan perda dan perkara, kualitas penanganan kebakaran	Meningkatnya kualitas penanganan perda dan perkara, penanganan kebakaran	Indeks pencapaian SPM Trantibumlinmas	Indeks	100	100	100	100	-
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	100	81,15		82	

Sumber : Renstra SATPOL PP 2025-2029

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Program PD Tahun 2024 dan 2025 TW II

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi
				2024		2025	2025 TW II
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	100		
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100		
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100		
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai		74,2	74,25	-
5.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	100	100	
		Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	
		Presentase Linmas yang dibina	%	100	100	100	
6.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Menit	15	11,2	15	

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel diatas, diketahui bahwa kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah **sebagian besar sudah tercapai** meskipun tidak dapat dijadikan pedoman capaian akhir tahun 2026, karena indikator bersifat absolut (target tahunan berdiri sendiri) tidak tergantung nilai pada tahun sebelumnya atau tidak akan mempengaruhi nilai tahun berikutnya.

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 TW 3	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Presentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/ Kota (TRANTIBUM)	%	100%	100%	100%		
2	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100%	100%	100%		
3	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	unit	47	726	47	726	
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	dokumen	16	16	16	16	
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/ PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan Satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	3	1	3	1	
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan dalam bentuk dokumen yang sah dan ilegal	dokumen	4	1	4	1	
7	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	2	4	2	4	
8	Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran	unit	64	119	64	119	
9	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	orang	66	59	66	59	
10	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	Layanan	15 Menit	50	15 menit	40	

11	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	-	136	-	190	
12	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak korban kebakaran	Orang	-	380	-		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOL PP Kabupaten Karanganyar, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah;
Secara umum program dimaksud tidak ada masalah semua berjalan sesuai dengan program. Tetapi ada beberapa kendala diantaranya :
 - a. Belum tersedianya mesin pembangkit listrik portable (genset) sehingga apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN maka aktivitas pelayanan yang membutuhkan daya listrik akan terhenti;
 - b. Masih kurangnya peralatan kantor guna mendukung kegiatan pelayanan kepegawaian seperti PC, laptop, printer, dsb;
 - c. Masih kurangnya kendaraan sebagai sarana mobilitas karena banyaknya kendaraan yang sudah mulai rusak;
 - d. Masih minimnya kesempatan dan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana, serta personil yang belum dapat tercapai secara ideal;
 - f. Belum dimilikinya dokumen rencana teknis pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. Upaya pembinaan ketenteraman dan ketertiban masih disikapi dengan cara responsif dan situasional;
 - h. Minimnya media koordinasi dan komunikasi antar SATPOL PP Kabupaten/Kota lain maupun OPD terkait, serta upaya sosialisasi peraturan-peraturan kepada OPD maupun kepada segenap lapisan masyarakat.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Kualitas disiplin aparaturnya yang masih perlu untuk ditingkatkan;
 - b. Masih kurangnya kendaraan sebagai sarana pelayanan operasional dan lapangan yang memadai;
 - c. Belum maksimalnya koordinasi dan kepedulian dari Organisasi Perangkat Daerah yang terkait terhadap tupoksi masing-masing sehingga pelanggaran perda dapat teratasi secara tuntas;
 - d. Keberadaan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan belum dioptimalkan dalam membantu tugas pokok dan fungsi SATPOL PP, termasuk dalam hal bantuan sarana, prasarana, dan dukungan personel SATPOL PP di wilayah;
 - e. Belum terdapat peraturan yang mengatur garis koordinasi dengan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan;
 - f. *Overlapping* tugas pokok yang mungkin terjadi dengan Instansi penegak hukum;
 - g. Keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa yang dikomandani oleh Kepala Desa/Lurah, belum dioptimalkan dalam membantu tugas pokok dan fungsi SATPOL PP, termasuk dalam hal bantuan sarana, prasarana, dan dukungan teknis, atau peningkatan sumber daya;
 - h. Kondisi perekonomian yang tidak stabil memicu meningkatnya PKL, PGOT sehingga diperlukan penanganan/penertiban yang melibatkan berbagai pihak terkait secara menyeluruh;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

- a. Masih perlu ditingkatkannya kualitas aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait;
- c. Perlunya sosialisasi mengenai kebakaran untuk mengantisipasi kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar;
- d. Perlunya pembentukan relawan kebakaran yang memadai;
- e. Perlunya pengembangan UPT pemadam kebakaran di wilayah bagian barat (Kecamatan Colomadu) dan wilayah timur (Kecamatan Karangpandan), sehingga dalam penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat teratasi dengan cepat;
- f. Pembuatan *hydrant* disetiap wilayah yang jangkauannya lumayan jauh, agar mempermudah untuk mendapatkan sumber air.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung Misi kelima dari Kepala Daerah yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah raga, diharapkan dengan teratasinya permasalahan yang ada bisa menghasilkan hasil yang maksimal sehingga bisa mendukung RPJMN.

Sedangkan isu penting yang harus ditindaklanjuti saat ini dalam program program di Satuan Polisi Pamong Praja adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.8.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Tahun 2026
Kabupaten Karanganyar

OPD : SATPOL PP

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SATPOL PP				13.331.262.909					19.843.080.809	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	5.212.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	20.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.606.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.606.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Realisasi Anggaran OPD	100%	6.723.129.709	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Capaian Realisasi Anggaran OPD	100%	6.723.129.709	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	6.723.129.709	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	6.723.129.709	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	170.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	257 Stel	170.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	116.606.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%	200.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.028.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	32.623.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.454.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.680.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.480.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	184.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	190.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	292.970.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Presentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	552.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	286.470.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	400.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	6.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100%	4.199.071.100	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100%	7.579.471.100	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	175.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	200.000.000	

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2 Dokumen	300.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2 Dokumen	3.880.400.000	
	Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Laporan	3.399.071.100	Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Laporan	3.399.071.100	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penangannya Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	163 Kasus	50.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penangannya Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	163 Kasus	30.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	25 Unit	200.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	25 Unit	-	

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Jumlah Aparatut Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	40 Orang	75.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Jumlah Aparatut Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	40 Orang	70.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Meningkatnya Penegakan Perda	100%	746.624.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		Meningkatnya Penegakan Perda	100%	696.240.000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	91 Laporan	100.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	91 Laporan	50.000.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	84 Laporan	646.624.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	84 Laporan	646.240.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kualitas anggota PPNS	100%	-	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kualitas anggota PPNS	100%	25.000.000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas	-	-	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat	-	25.000.000	

			Pejabat PPNS Penegak Perda					PPNS Penegak Perda			
PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran											
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				100%	905.000.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			100%	3.121.250.000	
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganya r	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		12 Laporan	865.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karanga nyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		12 Laporan	764.240.000
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Karanganya r	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		-		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Karanga nyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		1 Dokumen	30.000.000

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	80.000.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Jumlah Bulan Terpenuhiya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	10.000.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Jumlah Bulan Terpenuhiya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	10.000.000	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.000.000	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Presentase Meningkatnya Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	18.150.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Presentase Meningkatnya Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	58.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setia Tahunnya	100 Orang	40.000.000	

			Setiao Tahunnya								
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa/ Kelurahan	18.150.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa/ Kelurahan	18.000.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Presentase Terselenggara ya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	130.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Presentase Terselenggara a Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	65.000.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	15.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	-	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencairan dan Pertolongan Terhadap Kondisi	12 Dokumen	15.000.000	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencairan dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/	12 Dokumen	-	

			Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar					Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar			
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	50.000.000	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	4 Unit	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	4 Unit	65.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program, kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mana terdapat beberapa usulan terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat. Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Karanganyar

OPD: Satpol PP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/	Catatan
			Kinerja	Volume	
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Target kinerja SATPOL PP Tahun 2026 secara umum adalah : TERWUJUDNYA PARTISIPASI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA AGAR SINERGI DENGAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT. Selain itu target kinerja yang nantinya berwujud rencana Program dan Kegiatan, selaras dengan isu-isu yang berkembang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Perhatian terhadap upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam rangka menciptakan ketangguhan masyarakat terutama di sektor ekonomi, pendidikan dan kesadaran hukum kepada Masyarakat;
2. Satuan Polisi Pamong Praja mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akan mengakibatkan tumbuhnya pembangunan, seyogyanya diimbangi dengan upaya-upaya ketaatan pada hukum, pemberdayaan masyarakat dan kesadaran mental masyarakat untuk berpartisipasi aktif mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungannya masing-masing;
3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dilindungi dari ancaman atas kegiatan ekonominya, dan pihak swasta atas kegiatan industrinya, ditandai dengan tingginya semangat dan partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha untuk aktif terlibat dalam upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Masih lemahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar OPD/ Instansi terkait, dalam penyelenggaraan pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat;
5. Keterbatasan sumberdaya, baik manusia, sarana dan prasana, serta biaya sehingga membuat tugas operasional kurang lancar.

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45

6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah **“Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, perlindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;

21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indeks Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
- 2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

- 1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
- 2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
- 3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
- 4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
- 5) Meningkatnya riset dan inovasi;
- 6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
- 7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
- 8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
- 9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
- 10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
- 11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
- 12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah ***Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.***

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader

- posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
 9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keanekaragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
 10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
 11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
 12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
 13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
 14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
 15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
 16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan modernisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
 17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
 18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
 19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatnya Tata Pemerintah yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya Daerah dalam kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, “menantang” namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar memiliki sasaran sesuai dengan Renstra Satpol PP:

1. Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkara, penanganan kebakaran;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Capaian
					2026
	Terwujudnya penegakan perda dan perkara, kualitas penanganan kebakaran		Presentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	%	1
	Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkara, penanganan kebakaran		Indeks pencapaian SPM Trantibumlinmas	Indeks	100
		1) Program Penunjang Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	%	100
			Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
			Presentase Linmas yang dibina	%	0,11
		2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (responstime) penanganan kebakaran	Menit	15
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM	Nilai	82,1
		3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,3

3.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, yang meliputi :

1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan pelaksana yang ada di dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
2. Masyarakat kurang memahami keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja terkait peran, tugas pokok, dan fungsinya;

3. Bertambahnya jumlah penduduk yang berarti menjadi bertambahnya kebutuhan terhadap ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
4. Minimnya alokasi dana untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan juga menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kebebasan dalam berpendapat yang sering di salah artikan serta gaya hidup yang individualisme yang dapat memicu gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
6. Pergeseran ke zaman era globalisasi yang disalah gunakan
Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Karanganyar meliputi :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap politik;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah Daerah;
3. Melakukan pendekatan dengan Masyarakat dengan cara sosialisasi peran tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Menambah sumber daya manusia dalam peningkatan kebutuhan terhadap ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
5. Peningkatan Kerjasama antar instansi baik pemerintah dan non pemerintah.

3.5. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Pengukuran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk menilai sejauh mana tugas dan fungsi dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Proses pengukuran ini menggunakan berbagai indikator, seperti kecepatan respons terhadap aduan masyarakat, tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran, kualitas koordinasi lintas sektor, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Satpol PP dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan, sehingga mendorong perbaikan berkelanjutan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta optimalisasi kinerja organisasi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.5.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 3 : Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	Terwujudnya penegakan perda dan perkada, kualitas penanganan kebakaran	1. Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkada, penanganan kebakaran	1. Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas 2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : SATPOL PP, 2025

3.5.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkada, penanganan kebakaran	1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
	2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Penyelamatan Non Kebakaran	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		Penyelenggaraan Operasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia
			Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber : SATPOL PP, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar, pada kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Sejalan dengan misi Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 terdiri dari 3 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif yaitu Rp. 12.727.660.936,-. Dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
 - a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
 - 4) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - 5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 6) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja.

- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
 - 2) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota.
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**
- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
 - b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
 - 1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
 - 1) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
 - d. Penyelenggaraan Operasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia;
 - 1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia;
 - 2) Standarisasi sarana dan prasana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi;
 - 4) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi.

Pencapaian tujuan sesuai Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026 untuk pendanaannya seperti pada table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITA S DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF 2026 (Rp)	PRAKIRAAN MAJU 2027 (Rp)	
					CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
					TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05											8.793.823.799	24.657.000.000
1	05	02											
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
					Presenta se Patroli Siaga Ketertib an Umum dan Ketentra man Masyara kat	100%							

1	05	02	2.01	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kab. Karanganyar	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	-	-	75.000.000
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			Kantor Satpol PP	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-	-	15.000.000
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Laporan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 Laporan	2.379.100.000	7.000.000.000

1	05	02	2.02			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						Meningkatnya Penegakan Perda	100%		
1	05	02	2.02	0010		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Kantor Satpol PP	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	91 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	91 Laporan		25.000.000	225.000.000
1	05	02	2.02	0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		Kab. Karanganyar	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Sesuai SOP	85 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	85 Laporan		409.680.000	500.000.000
1	05	02	2.02	0012		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	-		-	50.000.000

1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						Presentase Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	100%		
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Kantor Satpol PP	Terlaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			-	20.000.000
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%					

1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Presentase Tertanganin ya Kasus Pemadaman Kebakaran	100%		
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Tersedian ya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakara n dalam Daerah Kabupate n/ Kota Setiap Tahunnya	-	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulanga n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	-			-	180.000.000
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Tersedian ya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadam an dan Pengenda lian Kebakara n dalam Daerah Kabupate n/ Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan			575.680.000	1.220.000.000

1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Kab. Karanganyar	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	75.000.000
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/ Kota		Kab. Karanganyar	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	75.000.000
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan		Kab. Karanganyar	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi	-	-	25.000.000

								Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya	Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya								
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Kantor Satpol PP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	Jumlah kebutuhan akan alat yang mendukung sarana operasional peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	2 Unit				40.000.000	1.800.000.000	

1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerjasama dan Informasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Kantor Satpol PP	Tersedian ya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	-	35.000.000	
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	-	-	35.000.000	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								Presentase Kecamatan yang dilakukan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	

1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Kab. Karanganyar	Tersedian ya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen			10.000.000	60.000.000
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran			Kab. Karanganyar	Tersedian ya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-			-	65.000.000
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran								Presentase kejadian kebakaran yang di investigasi	100%		
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			Kab. Karanganyar	Tersedian ya Dokumen yang Memuat Hasil	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan	-			-	25.000.000

									Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian						
1	05	04	2.04			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							Presentase Meningkatkan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%			
-	05	04	2.04	0001		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	-	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya					-	100.000.000
1	05	04	2.04	0002		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Kab. Karanganyar	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di	1 Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran	1 Desa/ Kelurahan				18.150.000	70.000.000

1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan		50.000.000	50.000.000
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	4 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	4 Unit		50.000.000	50.000.000

1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistik 5. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan tata Kelola keuangan daerah berbasis digital.	Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%							
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%				

1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kantor Satpol PP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		-	50.000.000
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kantor Satpol PP	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		-	65.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Capaian Realisasi Anggaran OPD	100%	
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kantor Satpol PP	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan		4.983.129.599	7.000.000.000

1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		
1	05	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						-	200.000.000
1	05	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kantor Satpol PP	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						-	200.000.000
1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah										Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100%		

1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Kompone n Instalasi Listrik/ Penerangan Banguna n Kantor	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			-	20.000.000
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Peralatan dan Perlengka pan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			-	40.000.000
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Bahan Logistik Kantor	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket			10.348.800	45.000.000
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket			5.063.900	30.000.000

1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Bahan Bacaan dan Peratura n Perundan g- undanga n	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12.000.000
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kantor Satpol PP	Terlaksana nya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		9.530.000	280.000.000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	2.000.000.000

1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	150.000.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kantor Satpol PP	Terlaksan any Penyedia an Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	25.000.000
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		117.000.00	250.000.000

1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Jasa Pelayana n Umum Kantor	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		25.200.000	85.000.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Presentase Terpelihara nya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan dan Pajak Kendaraa n Perorang an Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	150.000.000
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliha raan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas	30 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		149.787.500	400.000.000

									Operasio nal atau Lapangan							
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Satpol PP	Terlaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			-	50.000.000
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kantor Satpol PP	Terlaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit			-	125.000.000
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kantor Satpol PP	Terlaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit			-	50.000.000

1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor Satpol PP	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			12.000.000	60.000.000
---	----	----	------	------	--	--	------------------	--	---	--	---	--	--	------------	------------

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian
			2026
1	Persentase Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat	%	1,0
2	Indeks pencapaian SPM Trantibumlinmas	Indeks	100
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,1

Sumber : Renstra SATPOL PP 2025-2029

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian
			2026
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
6	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
7	Waktu tanggap bencana (<i>respon time</i>) penanganan kebakaran	Menit	15

Sumber : Renstra SATPOL PP 2025-2029

Tabel 4.4.
Program /Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten
Karanganyar Tahun 2026

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	PROGRAM, KEGIATAN YANG MENDUKUNG	PAGU ANGGARAN
1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.983.129.599
	2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.942.700

	3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.200.000
	4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.787.500
2) Intensif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta	2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	5) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000

Sumber : SATPOL PP, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan atau berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya;
3. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja yang telah diusulkan dan ditetapkan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaannya di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

